BAB II. MASYARAKAT MENJADI PEMILIH YANG CERDAS

II.1 Landasan Teori Penelitian

II.1.1 Politik

Maswardi Rauf (seperti dikutip Hikmat, 2010, h.36) menyebutkan bahwa komunikasi politik sebagai objek kajian ilmu politik karena pesan-pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi bercirikan politik, yaitu berkaitan dengan kekuasaan politik negara, pemerintah, dan aktifitas komunikator sebagai pelaku kegiatan politik. Komuniskasi politik dibagi dalam 2 dimensi yakni sebuah kegiatan politik penyampaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh aktor-aktor politik kepada pihak lain, dan kegiatan ilmiah, kegiatan politik dalam sistem politik.

II.1.1.1 Partai Politik

Definisi partai politik telah dikemukakan oleh beberapa ahli politik, diantaranya menurut ahli politik Carl J. Friedrich, Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil (Budiardjo, 2013, h.403).

Carl J. Friedrich : *a political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaning for its leader the control of a goverment, with the futher objective of giving to member of the party, through such control ideal and material benefits and advantages* (Budiardjo, 2013, h.403).

Sigmund Neumann mengemukaan definisi partai politik sebagai berikut. Partai politik adalah organisasi dari aktifitas-aktifitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda (Budiardjo, 2013, h.403).

Sigmund Neumann : *a political party is the articulate organization of society's active political agent; those who are concerned with the control of govermental*

policy power, and who complete for popular support with other group or groups holding divergent view (Budiardjo, 2013: 403)

II.1.1.2 Fungsi Partai Politik

Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 pasal 11 ayat 1 menjelaskan bahwa fungsi partai politik adalah:

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. (KPU, 2017, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, http://www.kpu-kalselprov.go.id)

II.1.1.3 Jumlah Partai Politik Verifikasi Pemilu 2014

Pada rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual yang disampaikan oleh seluruh KPU provinsi, tanggal 8 Januari 2013, KPU telah memutuskan 10 (sepuluh) parpol yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2014. Sedangkan sebanyak 24 partai dinyatakan tidak lolos. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2014, kesepuluh partai yang lolos verifikasi faktual tersebut adalah :

1. Partai Amanat Nasional (PAN)
2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
3. Partai Demokrat
4. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
5. Partai Golongan Karya (Golkar)
6. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

7. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
8. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
9. Partai NasDem
10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
11. (Komisi Pemilihan Umum, 2013, Laporan Pendaftaran, Verifikasi, dan Pemetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2014, http://kpu.go.id)

II.1.1.4 Kampanye Partai Politik

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 Pasal 1 No 20: "Iklan kampanye adalah penyampaian pesanpesan kampanye oleh peserta Pemilu kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik secara berulang-ulang berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang berisi ajakan, himbauan untuk memberikan dukungan kepada peserta Pemilihan Umum."

II.1.1.5 Iklan Partai Politik

Mc Nair (2011) mengungkapkan iklan politik, dalam arti sempit mengacu pada pembelian dan penggunaan ruang iklan berbayar untuk komersial ditingkat mengirimkan pesan-pesan politik kepada khalayak massa. Media digunakan untuk tujuan ini bisa melalui bioskop, billboard, pers, radio, televisi dan internet.

"*Political advertising therefore, in the strict sense, refers to the purchase and use of advertising space, paid for at commercial rates, in order to transmit political messages to a mass audience. The media used for this purpose may include cinema, billboards, the press, radio, television and the internet"* Menurut Mc Nair (2011, 87)

Tujuan dari iklan politik pada dasarnya bersifat informatif dan persuasif. Iklan partai politik digunakan sebagai ajakan untuk memilih kandidat tertentu atau membangun informasi kepada masyarakat untuk mengatahui sebuah partai melalui iklan yang bukan berunsur ajakan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu. Seperti halnya promosi iklan barang atau jasa yang bertujuan agar masyarakat

membeli produk atau menggunakan jasa mereka, iklan politik bertujuan untuk membuat masyarakat mengetahui dan memilih partai politik didalam pemilu. Sehingga penggunaan dari media dan cara pun hampir serupa dengan promosi sebuah produk/jasa.

II.1.1.6 Tingkat Kepercayaan terhadap Partai Politik

Dilansir pada laman kompas (http://nasional.kompas.com/) hasil survei Political Communication Institute (Polcomm Institute) mayoritas publik tidak mempercayai partai politik (parpol). Publik yang tidak percaya parpol yaitu sebesar 58,2 persen. Selain itu yang menyatakan percaya 26,3 persen, dan menyatakan tidak tahu sebesar 15,5 persen.b Faktor utama dibalik hasil tingkat kepercayaan yang rendah adalah :

1. Kasus korupsi yang menjerat banyak dari tokoh partai politik.
2. Publik banyak mengetahui mengenai konflik yang terjadi di dalam partai politik.
3. Banyaknya tokoh politik yang beretika kurang baik dan melanggar etika.

Survei ini dilakukan pada 20 Januari sampai 3 Februari 2014 dengan melibatkan 1000 responden dari 15 kota besar. Kasus politik yang dijabarkan adalah dengan meneliti dari 15 media massa yaitu 5 media cetak nasional, 5 media televisi, dan 5 media online. Metode riset dilakukan dengan dua tahap yaitu *content analysis* dan *discourse analysis*. Adapun *margin of error* yaitu 5 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. (Kompas, 2014, Survei: Mayoritas Publik Tak Percaya Partai Politik, http://nasional.kompas.com/)

II.1.2 Partisipasi Demokrasi

Partisipasi adalah keterlibatan pemilih pada keseluruhan periode siklus pemerintahan, yaitu pada periode pemilihan dan periode di luar pemilihan. (Komisi Pemilihan Umum, 2015, Buku Panduan Pemilih Cerdas, http://kpu.go.id). Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik adalah:

1. Kesadaran Politik

   Kesadaran terhadap kewajiban dan hak masyarakat sebagai warga negara. Seperti kewajiban masyarakat untuk memilih dalam pemilu dan hak dalam memberikan suara atau aspirasi terhadap negara.

2. Kepercayaan Politik

   Sikap dan kepercayaan masyarakat yang diberikan terhadap pemimpinnya. Seperti mempercayakan keberlangsungan negara kepada seorang pemimpin yang memimpinnya dan percaya bahwa peimpin tersebut akan memberikan perubahan yang lebih baik.

   Berdasarkan hal tersebut, partisipasi politik terbagi menjadi empat, diantaranya:

   a. Partisipasi Politik Aktif

      Partisipasi politik dimana masyarakat memiliki kesadaran dan kepercayaan terhadap politik yang tinggi. Tipe masyarakat dengan kesadaran partisipasi politik seperti ini adalah sebuah contoh yang paling terbaik, karena masyarakat dengan tipe tersebut sudah tergolong kepada masyarakat yang cerdas dan bijak.

   b. Partisipasi Politik Apatis

      Jika memiliki kesadaran dan kepercayaan politik yang rendah. Tipe masyarakat dengan kesadaran partisipasi politik seperti ini adalah sebuah contoh yang paling buruk, karena masyarakat dengan tipe tersebut sudah tergolong kepada masyarakat yang tidak cerdas.

   c. Partisipasi Politik Pasif

      Jika memiliki kesadaran politik yang rendah, sedangkan kepercayaan politiknya tinggi. Tipe masyarakat dengan kesadaran partisipasi politik seperti ini adalah sebuah contoh yang masih kerang cerdas, karena masyarakat dengan tipe tersebut mungkin hanya akan memilih pemimpin tertentu yang disukai tanpa menimbang hal lainnya. Masyarakat dengan tipe ini juga membutuhkan banyak pengetahuan untuk meningkatkan kesadaran politik.

d. Partisipasi Politik Militant Radikal

Jika memiliki kesadaran politik tinggi, sedangkan kepercayaan politik yang rendah. Tipe masyarakat dengan kesadaran partisipasi politik seperti ini adalah sebuah contoh yang masih kerang cerdas, karena masyarakat dengan tipe tersebut mungkin hanya akan berkomentar atau mengamati peristiwa politik tanpa mempecayai partai politik atau pemimpin manapun. Masyarakat dengan tipe ini membutuhkan bukti dari politik Indonesia untuk meningkatkan kepercayaan terhadap partai politik (Ramlan, 1999).

II.1.3 Periklanan

Morrisan menyebutkan bahwa iklan adalah “Setiap bentuk komunikasi nonpersonal mengenai suatu organisasi, produk, servis, atau ide yang dibayar oleh satu sponsor yang di ketahui" (2010, 17).

II.1.4 Kriteria Pemilih Cerdas

Berikut adalah kriteria Pemilih Cerdas menurut Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi :

1. Pastikan terdaftar dalam Daftar Pemilu
2. Sikap proaktif dibutuhkan sebagai bentuk partisipasi dalam pemilu. Pastikan nama pemilih terdaftar dan jika tidak, segera melaporkan padaanitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan.
3. Mengenali Calon yang akan dipilih
4. Sebelum memilih pastikan mengetahui rekam jejak dari calon yang akan dipilih. Banyak cara untuk mengetahuinya, pertama manfaatkanlah informasi dari media seperti TV, radio, Koran, Internet atau cek profil dan CV para calon anggota legislatif melalui website kpu atau dapat mempelajari calon kandidat dari sosial media seperti twitter, Facebook, Instagram, dll
5. Ketahui Program, Visi, dan Misi dari Calon dan Partai Politik
6. Sebelum menentukan pilihan didalam pemilu, kenali dan ketahui riwayat hidup calon dan partai politiknya. Riwayat hidup calon dapat berhubungan dengan latar belakang pendidikan, pekerjaan, aktivitas dalam masyarakat, pernahkah calon tersebut terjerat tindak kriminal atau pidana, tindakan pelanggaran HAM,

dll. Dari segi riwayat partai dapat berhubungan dengan sejarah pendirian partai, pengurusnya, rekam jejak di pemilu dan pemerintahan sebelumnya jika bukan termasuk partai yang baru.

7. Diskusikan dengan Berbagai Unsur Masyarakat.
8. Setelah memiliki informasi yang cukup mengenai visi, misi dan program partai politik, dapat juga mengenal lebih dalam dengan mendiskusikan informasi dan data tersebut dengan berbagai unsur yang ada di masyarakat sehingga data dan informasi itu dapat diperkaya dan menjadi dasar yang kuat dalam menentukan pilihan.
9. Pastikan Suara Diberikan dan dinyatakan "Sah"
   (Perludem, 2015, Buku Panduan Pemilih Cerdas Perludem, http://perludem.com)

II.2. Objek Penelitian

Berikut adalah isi dari program pendidikan pemilih yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum, diambil dari Jurnal Pedoman Pendidikan Pemilih di *website* KPU.

II.2.1 Pedoman Pendidikan Pemilih

Pendidikan pada pemilu adalah sebuah pendidikan untuk memahami konteks terkait pemilu dan demokrasi berbangsa dan bernegara. Pendidikan Pemilih kemudian adalah kegiatan usaha untuk menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan pemilu dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada warganegara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih atau dalam tahap sebelum dapah hak untuk mengikuti pemilu. Dalam pendidikan pemilih, di dalamnya mencakup pemberian informasi kepemiluan, pemahaman mengenai 3 aspek-aspek pemilu serta demokrasi. Pendidikan pemilih penting karena beberapa alasan:

1. Membantu penyelenggara pemilu melaksanakan pemilu dengan baik. Dengan banyaknya pemilih yang memahami akan sistem dan regulasi dari pemilu akan memudahkan pihak penyelenggara untuk pelakukan pemilu.

2. Meningkatkan partisipasi pemilih. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memilih dalam pemilu akan menimbulkan kenaikan partisipasi dalam pemilu.
3. Meningkatkan kualitas partisipasi pemilih. Angka kecurangan pemilu, konflik pemilu, mobilisasi pemilih dapat dicegah dan dikurnagi jumlahnya sehingga mendapatkan pilihan pemenang yang berkualitas.
4. Memperkuat sistem demokrasi. Pendidikan pemilih adalah sebuah pembentukan dari nilai dan kesadaran akan peran, hak, kewajiban, dan tanggung jawab pemilih di negara dengan sistem demokrasi.

II.2.2 Materi Pendidikan Pemilih

Materi pendidikan pemilih adalah sebuah pendidikan yang ingin di tanamkan kepada setiap masyarakat untuk dapat memahami nilai dalam demokrasi. Materi tersebut terseber ke dalam beberapa kategori pembahasan, yaitu :

1. Demokrasi

   Hampir semua negara di dunia mendeklarasikan diri sebagai negara demokrasi, dan sangat sedikit yang menolaknya. Demokrasi dipandang sebagai rezim terbaik dalam mengelola kebutuhan manusia Kekuasaan non- demokrasi semakin hari semakin berkurang. Kesadaran tentang itu penting untuk ditanamkan. Pembahasan tema demokrasi diantaranya mencakup:

   a. Pengertian demokrasi
   b. Ciri-ciri negara demokrasi
   c. Kedudukan warga negara dalam negara demokrasi
   d. Hambatan pelaksanaan demokrasi
   e. Memperkuat efektivitas demokrasi

2. Kelembagaan Negara

   Salah satu penterjemahan dari kekuasaan demokrasi adalah keberadaan organ atau cabang kekuasaan dalam negara. Masing-masing organ kekuasaan memiliki karakteristik dan fungsi tersendiri. Dengan organ kekuasaan itu negara dijalankan, dan pada organ kekuasaan itu rakyat meminta pertanggungjawaban. Pembahasan tentang kelembagaan negara setidaknya mencakup tentang:

a. Pengertian kelembagaan negara
b. Cabang kekuasaan negara
c. Kekuasaan negara dalam Konstitusi
d. Tantangan kelembagaan negara
e. Peran rakyat atas kelembagaan negara

3. Pemilu

Pemilu menjadi elemen penting negara demokrasi. Pada pemilu, rakyat berpartisipasi memilih pemimpin yang akan duduk dalam lembaga negara dan memberi kompensasi atas pemerintahan yang sedang berjalan (reward and punishment). Pemilu dilakukan secara periodik sehingga terjadi sirkulasi kepemimpinan. Pembahan tema demokrasi diantaranya mencakup:

a. Pengertian pemilu
b. Prinsip-prinsip pemilu jujur dan adil (free and fair)
c. Sistem pemilu
d. Kelembagaan pemilu dan fungsinya
e. Tahapan pemilu

4. Partisipasi Politik

Partisipasi adalah jantung dari pemilu dan demokrasi. Tanpa partisipasi, pemilu dan demokrasi menjadi kehilangan makna. Patisipasi memastikan daulat rakyat, yaitu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat menemukan wujud konkretnya. Pembahasan tentang partisipasi pemilih diantaranya mencakup:

a. Pengertian partisipasi
b. Fungsi partisipasi
c. Bentuk dan arena partisipasi:
d. Periode masa pemilihan dan;
e. Periode pasca pemilihan
f. Tantangan partisipasi

II.2.3 Rumah Pintar Pemilu

Pendidikan pemilih dapat dilakukan pula dengan membuat satu tempat dengan peruntukan khusus dapat disebut “Rumah Pintar Pemilu”, atau sebutan lain. Sistematika dari rumah pintar pemilu ini adalah dnegan memanfaatkan sebuah ruangan atau ruangan terbuka sebagai tempat pembelajaran. Pada rumah pintar pemilu ini, satu sisi berbagai program pendidikan pemilih dilakukan, dan bisa menadi sebuah komunitas peduli demokrasi. Rumah pitar pemilu merupakan sarana untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan inspirasi masyarakat tentang pentingnya pemilu dan demokrasi semua disampaikan di rumah pintar pemilu. Untuk dapat encapai itu semua diperlukannya sarana yang mendukung untuk mewujudkan program tersebut, salah satu sarana media tersebut adalah tempat penayangan audio visual, ruang pameran, ruang simulasi, dan ruang diskusi. (Komisi Pemilihan Umum, 2015, Buku Panduan Pemilih Cerdas, http://kpu.go.id).

II.3 Analisa

Data kualitatif yang didapat dari hasil observasi, wawancara, kuisioner, dan studi dokumentasi, akan dianalisis melalui metode desktiptif.

Menurut Bogdan dan Taylor (1975) (seperti dikutip oleh Moleong, 2007, h.4) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Data didapat dari wawancara masyarakat yang merupakan partisipan pemilih aktif. data dokumen juga didapatkan dari KPU Provinsi Jawa Barat dan kuesioner dari masyarakat. Kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif dengan tujuan untuk memaparkan hasil dari penelitian. Responden dari kuesioner adalah masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya yang merupakan pemilih aktif diutamakan kategori pemilih pemula.

II.3.1 Data Responden

Pendapat dari masyarakat diperlukan untuk mendukung penelitian. Dalam hal ini responden yang dilibatkan berjumlah total 50 orang, dan dipilih dari kota Bandung.

II.3.1.1 Data Kuesioner

A. Persepsi Masyarakat Terhadap Partai Politik

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan sebagian besar masyarakat banyak berpendapat bahwa partai politik di Indonesia itu rumit, membingungkan, kacau, kemudian selain itu terdapat pendapat yang mengatakan bahwa banyak partai yang lupa akan janjinya terhadap masyarakat, dan kemudian lupa juga akan janjinya ketika telah terpilih menjadi wakil rakyat yang pada akhirnya hanya mementingkan tentang organisasi mereka sendiri. Sebagian mempertanyakan peran sebenarnya dari partai politik, dan terlalu banyaknya partai membuat persaingan antar partai menjadi kurang sehat, dan banyak melakukan pembohongan publik antar partai politik. Namun, ada sebagian masyarakat juga menanggapi partai politik dengan positif dan berpendapat bahwa partai politik itu sebuah wadah delegasi pemimpin, penyalur aspirasi, dan banyaknya partai politik tercermin bahwa aspirasi masyarakat cukup baik.

Dari hasil kuesioner diatas dapat asumsikan bahwa sebagian besar masyarakat masih menganggap negatif dan kurang mempercayai partai politik di Indonesia, namun ada sebagian juga yang masih kritis dan memandang baik terhadap persepsi partai politik di Indonesia.

B. Pemahaman Tentang Isi Kampanye Iklan Partai Politik

Dalam hal pemahaman isi kampanye, 56.9% responden menyatakan bahwa ragu dalam memahami pesan dalam kampanye, kemudian 27,5% mengatakan ‘Tidak’ memahami, dan 15,7% memahami isi kampanye yang dilihatnya. Dari data pengamatan terhadap masyarakat diatas, dapat disimpulkan secara garis besar bahwa responden lebih banyak yang merasa ragu antara paham, atau tidak. Hal inilah yang akan memungkinkan menjadi penyebab mengapa

masyarakat cenderung menjadi apatis dalam pemilihan. Meskipun jumlahnya kecil, tapi masih ada sebagian responden mengerti apa yang disampaikan partai politik dalam iklannya.

C. Pertimbangan Partai Politik Dalam Memilih Calon

Untuk melihat bagaimana pengaruh sebuah partai mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih sebuah calon pemimpin, diketahui berdasarkan pengamatan, sebagian besar masyarakat yang berpendidikan memilih partai pengusung sebagai keputusannya dalam memilih, dan sebagian diantaranya tidak melihat sama sekali partai pengusung suatu calon untuk dipilih. Maka ini menjadi bukti masih ada sekelompok masyarakat bahkan masyarakat yang berpendidikan tidak melihat dan mempertimbangkan partai pengusung sebagai pertimbangannya dalam memilih suatu calon pemimpin.

D. Pengaruh iklan terhadap keputusan untuk memilih

Dari data pengamatan juga diketahui 33 orang responden berpendapat bahwa iklan mempengaruhi terhadap keputusan pilih, sedangkan 17 orang diantaranya menganggap iklan kampanye tidak mempengaruhi. Data ini menujukan bahwa dominasi masyarakat terpengaruh akan tayangan iklan partai politik pada televisi, dan sebagian lagi tidak terpengaruh. Hal inilah yang kemudian membuat kurangnya kualitas dari partisipasi masyarakat dalam memilih, karena kesadaran politik yang kurang juga membuat masyarakat terpengaruh dengan iklan partai politik.

II.4 Resume

Berdasakan riset yang telahh dilakukan dapat disimpulkan bahwa iklan partai politik & fenomena politik sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, Masyarakat juga lebih banyak yang merasa ragu antara paham, atau tidak dalam melihat iklan kampanye partai politik. Sebagian masyarakat terdidik masih memilih berdasarkan partai politik, namun sebagian lagi sudah tidak menghiraukan partai politik sebagai pertimbangannya dalam memilih. Didukung oleh persepsi negatif dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat

terhadap politik juga membuat masyarakat yang kemudian memutuskan untuk apatis dan tidak memilih ketika pemilihan umum.

Komisi Pemilihan Umum telah memiliki sebuah program pendidikan pemilih yang berfungsi untuk mencerdaskan masyarakat menjadi pemilih cerdas. Program tersebut memebrikan pengetahuan seputar demokrasi, politik, pemilu dan partisispasi sebagai bekal masyarakat untuk menjadi pemilih cerdas. Berbagai media digunakan dalam penyebaran sosialisasi programnya, namun belum banyak yang mengetahui program tersebut.

II.5 Solusi Permasalahan

Maka dari itu diperlukan solusi yang dapat memberikan pemahaman dan ajakan kepada masyarakat pemilih pemula untuk menjadi pemilih cerdas agar muncul kepercayaan dan kesadaran masyarakat terhadap politik serta ikut berpartisipasi dalam memilih di pemilihan umum. Rangkain solusi ini kemudian diharapkan terjadi perubahan pola fikir masyarakat juga dapat menyongsung pemilihan umum yang lebih baik di kemudian hari sehingga tercapai nilai nilai dari demokrasi.